RENCANA AKSI ATAS KINERJA

TAHUN 2025

PADA DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PANGANDARAN

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Aksi merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan kepada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran untuk mempertanggungjawabkan pelaksananaan Kinerja Instansi Pemerintah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang strategis.

Pada Rencana Aksi telah diindentifikasi beberapa kendala/Kendala yang perlu segera ditindak lanjuti dalam rangka Implementasi SAKIP Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran yang lebih baik sesuai perturan perundangan yang berlaku. Tentunya guna memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilkan, dan meningkatkan kinerja segenap jajaran Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang lebih Akuntabel serta Efektif dan Efisien.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, berkoordinasi, serta bekerjasama dalam proses penyusunan Rencana Aksi ini. Diharapkan Rencana Aksi ini bisa dijadikan acuan bagi semua pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung serta dapat memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 06 Januari 2025
Kepala Dinas
Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Pangandaran

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DKBP3A

H. DANI HAMDANI, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650417 199003 1 013

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan perangkat daerah yang membantu bupati dalam pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dalam rangka tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayanaguna, dan berhasil guna bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sejalan dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian dalam undang- undang tersebut dijelaskan bahwa asas-asas umum penyelengaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelengaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas perlu dilaksanakan secara konsekwen. Dalam pejelasan mengenai pasal tersebut, juga dirumuskan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelengaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelengara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud sebagai laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah

yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sejak tahun 2014 sampai saat ini secara kuantitas laporan capaian kinerja instansi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran telah disampaikan kepada Bupati Pangandaran secara tepat waktu, tetapi dari segi kualitas masih perlu di tingkatkan dan di intregasikan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Dengan demikian agar kualitas laporan akuntabilitas kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Pangandaran bisa lebih baik sesuai harapan, maka disusun Rencana Aksi atas kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Pangandaran.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam menyusun rencana aksi atas kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan Lampiran Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evalusi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 3/103/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
13. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Maksud dan tujuan

Penyusunan rencana aksi ini dimaksudkan sebagai instrumen dalam melaksanakan Manajemen Kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Pangandaran. Adapun rencana aksi ini bertujuan untuk :

1. Dijadikan pedoman dalam memperbaiki Kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Pangandaran;
2. Menciptakan Manajemen Kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran yang lebih berkualitas, berorientasi hasil, efektif dan efisien.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana aksi ini meliputi Manajemen Kinerja, yang bermuara pada Perbaikan dan Peningkatan Kualitas :

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja;
4. Evaluasi kinerja;
5. Capaian kinerja;

BAB II
RENCANA AKSI ATAS KINERJA
DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYANA PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Kendala Capaian Kinerja DKBP3A Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran mendapat nilai sebesar **70,30 %** dengan interpretasi **BB** (**Baik)**. Berdasarkan nilai tersebut secara umum Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan terdapat beberapa kelemahan sesuai dengan Catatan/Kendala hasil evaluasi SAKIP tahun 2023.

Selain itu Penyebab Kendala dalam Capaian Kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Pangandaran, yaitu:

1. Pedoman Teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada tingkat instansi belum ada sehingga perencanaan kinerja ditingkat unit masih mengacu pada pedoman ditingkat nasional/ provinsi;
2. Evaluasi telah dilakukan oleh semua bidang namun pelaksanaan dimaksud dilaksanakan berdasarkan SOP/ pedoman serta belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi;
3. Banyaknya kegiatan tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai;
4. Refocusing dan Efisiensi anggaran pemerintah daerah berimbas langsung pula terhadap keterbatasan pelaksanaan kegiatan untuk penyelenggaraan pengawasan berupa sosialisasi/bimbingan teknis pendampingan maupun monitoring terhadap OPD yang menunjang peningkatan capaian kinerja;
5. Tidak adanya kegiatan workshop, Bimtek dan Pembinaan terkait Kapabilitas SAKIP maupun tentang indeks pelayanan publik.

B. Rencana Aksi Kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Pangandaran

Berdasarkan Kendala-Kendala tersebut diperlukan upaya perbaikan secara nyata dan mendasar, diantaranya tertuang dalam Rencana Aksi yaitu sebagai berikut :

RENCANA AKSI

DINAS KELUARGA BERENCANA PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	TR I			TR II			TR III			TR IV		
		TR I	TR II	TR III	TR IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai LHE AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak				A (80-90)	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas**	**1. 90% 2. 100% 3. 90% 4. 100%**		**3.271.898.035,00**												
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu**	**1. 100% 2. 100% 3. 100%**		**5.825.000,00**												
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Penyusunan KAK Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.825.000,00	SEKRETARIAT											
									Penyusunan Laporan Capaian Kinerja														
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik**	**100%**		**2.612.733.333,00**													
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	1. Penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) Penyediaan Gaji dan Tunjngan ASN	2.609.463.333,00	SEKRETARIAT												
									2. Penyusunan daftar gaji														
									3. Pengajuan Pembayaran dan Pengeluaran Laporan Pembayaran Gaji (23 Orang/ Bulan)														
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1. Penyusunan KAK Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.270.000,00	SEKRETARIAT												
									Penyusunan Laporan Keuangan														
									3. Penetapan Laporan Realisasi Anggaran														
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik**	**100%**		**164.475.685,00**													
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1. Penyusunan KAK	6.559.850,00	SEKRETARIAT												
									2. Belanja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor														
									3.Mendata Jumlah Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
									4. Laporan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor														
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	1. Penyusunan KAK	49.742.197,00	SEKRETARIAT												
									2. Terlaksanya Survei Harga														
									3. Penyusunan Nota Dinas														
									4. Penyusunan Dokumen Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
									5. Penyusunan Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
									6. Penyusunan Surat Bukti Pengeluaran Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
									7. Penyampaian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga		1.Penyusunan KAK														
									2.Penginputan data Belanja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga melalui aplikasi pengadaan														
									3.Belanja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	TR I			TR II			TR III			TR IV		
		TR I	TR II	TR III	TR IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	4. Penyusunan Surat Bukti Pengeluaran Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.330.622,00	SEKRETARIAT												
									5.Mendata jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang akan didistribusikan untuk tahun berikutnya (n+1)														
									6.Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	1.Penyusunan KAK	9.405.000,00	SEKRETARIAT												
									2. Penginputan data Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan melalui aplikasi pengadaan														
									3.Belanja Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
									4. Penyusunan Surat Bukti Pengeluaran Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
									5. Mendata jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang akan didistribusikan untuk tahun berikutnya (n+1)														
									6. Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	1. Penyusunan KAK	13.838.016,00	SEKRETARIAT												
									2.Penginputan data Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan melalui aplikasi pengadaan														
									3.Belanja Surat Kabar yang dibayar setiap bulan														
									4. Penyusunan Surat Bukti Pengeluaran Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
									5. Mendata Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang akan didistribusikan untuk tahun berikutnya (n+1)														
									6.Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	1.Penyusunan KAK	78.600.000,00	SEKRETARIAT												
									2.Penginputan data Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD melalui aplikasi pengadaan														
									3. Mencatat kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah														
									4. Pengadministrasian dan penyusunan SPJ Perjalanan Dinas														
									5.Mendata jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya (n+1)														
									6.Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan pemenuhan Barang Milik Daerah**	**100%**		**170.516.652,00**													
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	1. Penyusunan KAK Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.516.652													
									2. Penginputan data Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya melalui aplikasi pengadaan														
									3. Melakukakan Survei harga														
									4. Penyusunan Dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	TR I			TR II			TR III			TR IV		
		TR I	TR II	TR III	TR IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									5. Melaksanakan Serah Terima Barang hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
									6. Penyusunan Dokumen Belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
									7. Melakukan distribusi barang ke bidang														
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.Penyusunan KAK	140.000.000,00	SEKRETARIAT												
									2.SPK Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara														
									3.Pembayaran Gedung kantor														
									4.Pelaporan Pembayaran Gedung Kantor														
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**100%**		**249.750.865,00**													
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.Penyusunan KAK	5.000.000,00	SEKRETARIAT												
									2.Penyusunan Nota Dinas														
									3.Penyusunan Kwitansi Pembayaran														
									4.Penyusunan Surat Bukti Pengeluaran														
									5.Penyampaian Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1.Penyusunan KAK	33.298.865,00	SEKRETARIAT												
									2.Penyusunan Nota Dinas														
									3.Penyusunan Kwitansi Pembayaran														
									4.Penyusunan Surat Bukti Pengeluaran														
									5. Penyampaian Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	1.Penyusunan KAK	211.452.000,00	SEKRETARIAT												
									2.Penyusunan SPK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan														
									3.Penyusunan Nota Dinas														
									4.Penyusunan Kwitansi Pembayaran														
									5. Penyusunan Surat Bukti Pengeluaran Honor														
									6.Penyampaian Laporan Kinerja Operator, Supir dan Administrasi														
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi**	**100%**		**68.596.500,00**													
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1.Penyusunan KAK	31.000.000,00	SEKRETARIAT												
									2.Penyusunan Nota Dinas														
									3.Penyusunan Kwitansi Pembayaran														
									4.Penyusunan Surat Bukti Pengeluaran Pajak Kendaraan														
									5. Penyusunan Surat Bukti Pengeluaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas jabatan														
									6. Penyusunan Bukti Pengeluaran Belanja Pemeliharaan dan Suku Cadang Kendaraan Dinas jabatan														
									7.Penyampaian Laporan Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan														
									1.Penyusunan KAK														
									2.Penyusunan Nota Dinas														
									3.Penyusunan Kwitansi Pembayaran														
									4. Penyusunan Surat Bukti Pengeluaran Pajak Kendaraan														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	TR I			TR II			TR III			TR IV		
		TR I	TR II	TR III	TR IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	5. Penyusunan Surat Bukti Pengeluaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional	22.596.500,00	SEKRETARIAT												
									6. Penyusunan Bukti Pengeluaran Belanja Pemeliharaan dan Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional													
									7.Penyampaian Laporan Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional													
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	1.Penyusunan KAK	15.000.000,00	SEKRETARIAT												
									2.Penyusunan Nota Dinas														
									3.Penyusunan Kwitansi Pembayaran														
									4.Penyusunan Surat Bukti Pengeluaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
									5.Penyampaian Laporan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Meningkatnya Peranan Perempuan dalam Proses Pembangunan	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional				51,86%	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Persentase Kelembagaan PUG aktif**	**1. 14,98% 2. 94,62%**		**178.848.704,00**													
	Persentase Partisipasi Angkatan kerja Perempuan				67,56%	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah regulasi tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun**	**1 Dokumen**		**44.548.704,00**													
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1. Penyusunan KAK	14.849.600	Bidang P3A												
									2. Melaksanakan Koordinasi awal terkait evaluasi PUG														
									3. Pelaksanaan Evaluasi PUG														
									4. Pelaporan kegiatan														
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1. Penyusunan KAK	14.849.402,00	Bidang P3A												
									2. Melakukan Koordinasi Pelaksanaan PUG														
									3. Penyusunan POKJA														
									4. Sosialisasi terkait Dukungan Program P2WKSS														
									5. Menyusun SPJ														
						Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	1. Penyusunan KAK Kegiatan	14.849.702,00	Bidang P3A												
									2. Penyusunan Jadwal dan Materi Kegiatan														
									3. Pembelajaran Sekoper Cinta														
									4.Menyusun SPJ														
	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen				30%	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**	**100 Orang**		**134.300.000,00**													
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1. Penyusunan KAK	134.300.000,00	Bidang P3A												
									2. Penyusunan SPK														
									3.Penyusunan Nota Dinas														
									4. Sosialisasi Perempuan di Bidang Politik														
									5. Penyusunan Kwitansi Pembayaran														
									6. Menyusun SPJ														
Pelayanan terhadap korban kekerasan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan Komprehensif				100%	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar**	**84%**		**21.114.872,00**													
						Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan yang dilaksanakan**	**1 Regulasi (Perda/Perbup)**		**7.856.380,00**													
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Penyusunan KAK	7.856.380,00	Bidang P3A												
									Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KDRT dan TPPO)														
									Pembuatan SPJ dan Laporan Kegiata														
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia**	**2 Kasus**		**13.258.492,00**													
									1. Penyusunan KAK														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	TR I			TR II			TR III			TR IV		
		TR I	TR II	TR III	TR IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Layanan	2. Melakukan Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	13.258.492,00	Bidang P3A												
									3. Pelayanan dan Penanganan Kasus terhadap Perempuan														
									4. Menyusun SPJ														
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)**	**60%**		**105.000.000,00**													
						Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah PEKKA yang mendapatkan pelatihan**	**1 Kelompok**		**105.000.000,00**													
						Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1. Penyusunan KAK	105.000.000,00	Bidang P3A												
									2. Penyusunan SPK														
									3. Penyusunan Nota Dinas														
									4. Penyusunan Kwitansi Pembayaran														
									5. Pengeluaran Bukti Honor														
									6. Menyusun SPJ														
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase pemenuhan kelompok hak anak**	**100%**		**56.350.944,00**													
							Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak	**Madya (600-700)**		**56.350.944,00**													
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**1 Lembaga**		**56.350.944,00**													
						Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	116 orang	1. Penyusunan KAK	8.950.944,00	Bidang P3A												
									2. Pengukuhan Anggota FAD														
									3. Sosialisasi FAD dalam Pembangunan														
									4. Menyusun SPJ														
						Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1. Penyusunan KAK	47.400.000,00	Bidang P3A												
									2. Penyusunan SPK														
									3. Melakukan Koordinasi awal Evaluasi KLA														
									4. Penyusunan Indikator KLA														
									5. Pengumpulan dan Penginputan Dokumen KLA														
									6. Penyusunan SPJ Honor														
									7. Menyusun SPJ														
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase penurunan kekerasan terhadap anak**	**12%**		**66.943.826,00**													
						Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak**	**1 Lembaga**		**32.710.944,00**													
						Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	2 Orang	1. Penyusunan KAK	32.710.944,00	Bidang P3A												
									2. Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan														
									3. Penyusunan SPJ dan Laporan Kegiatan														
						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tersedia**	**1 Lembaga**		**11.410.944,00**													
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	2 Orang	1. Penyusunan KAK	11.410.944,00	Bidang P3A												
									2. Pelayanan Pengaduan dan Respon Kasus Kekerasan terhadap Anak														
									3. Penyusunan SPJ dan Laporan Kegiatan														
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan**	**1 Lembaga**		**22.821.938,00**													
						Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	1 Lembaga	1. Penyusunan KAK	11.410.994,00													
									2. SPK Pengadaan Rumah Aman														
									3. Pembayaran Sewa Rumah Aman														
									4. Pelaporan dan Pembayaran Sewa Rumah Aman														
									1. Penyusunan KAK	11.410.944,00													

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	TR I			TR II			TR III			TR IV		
		TR I	TR II	TR III	TR IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	2. Sosialisasi dan Koordinasi Layanan AMPK dengan *Stakeholder*														
									3. Penyusunan SPJ dan Laporan Kegiatan														
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)				2,16%	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**1. Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA)**	**100%**		**268.135.878,00**													
							2. Validitas data keluarga beresiko stunting	**100%**		**-**													
						Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Jumlah koordinasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dilaksanakan**	**1 kali kegiatan**		**37.857.252,00**													
						Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	1. Penyusunan KAK Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	19.178.626	Bidang Dalduk												
									2. Melakukan rapat dengan bidang untuk menentukan Lokus sekolah dan jadwal kegiatan														
									3. Membuat undangan kepada sekolah yang di jadikan lokus														
									4. Menyebarkan undangan														
									5. Melaksanakan kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal													
						Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja tentang Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	18.678.626,00	Bidang Dalduk												
									2. Analisa Organisasi untuk Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal														
									3. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal														
									4. Tersusunnya Dokumen Penguatan Kerja Sama (MOU) Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal													
						Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**1. Jumlah dokumen pemetaan pengendalian penduduk cakupan daerah yang disusun**	**1 Dokumen**		**230.278.626,00**													
							2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting	**2 Dokumen**		**-**													
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	10 Laporan	1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	42.300.000,00	Bidang Dalduk												
									2. Penyusunan Materi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
									3. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
									4. Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Infomasi Keluarga														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	TR I			TR II			TR III			TR IV		
		TR I	TR II	TR III	TR IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja tentang Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	48.300.000,00	Bidang Dalduk												
									2. Analisa Kebutuhan Formulir Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
									3. Pelaksanaan Pengadaan Formulir Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
									4. Penyusunan Dokumen Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 dukomen	1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja tentang Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	120.000.000,00	Bidang Dalduk												
									2. Penyusunan Surat Perjanjian Kerja														
									3. Penyusunan Nota Dinas														
									4. Penyusunan Kwitansi Pembayaran Honor														
									5. Penyusunan Kwitansi Pembayaran Internet														
									6. Penyusunan Surat Bukti Pengeluaran Honor														
									7. Penyusunan Surat Bukti Pengeluaran Internet														
									8. Penyampaian Laporan Kinerja Individu Tenaga Administrasi Teknis														
						Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	1 Unit	1. Penyusunan KAK Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	19.678.626,00	Bidang Dalduk												
									2. Melakukan rapat dengan bidang untuk menentukan Lokus RDK														
									3. Membuat undangan kepada sekolah yang di jadikan lokus RDK														
									4. Menyebarkan undangan														
									5. Melaksanakan kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain													
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**1. Prevalensi peserta KB aktif**	**75,74%**		**2.271.529.000,00**													
							2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting	**75%**		**-**													
						Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**1. Jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan**	**2 Kali Kegiatan**		**780.108.000,00**													
							2. Jumlah kali rakor tentang stunting tingkat kecamatan	**12 Kali Kegiatan**		**-**													
						Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja tentang Pengendalian Program KKBPK	137.200.000,00	Bidang Dalduk												
									2. Penyusunan Surat Perjanjian Kerja														
									3. Penyusunan Nota Dinas														
									4. Penyusunan Kwitansi Pembayaran Honor														
									5. Penyusunan Surat Bukti Pengeluaran Honor														
									6. Penyampaian Laporan Kinerja Individu Tenaga Administrasi Teknis														
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan	12 Laporan	1. Penyusunan KAK kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	315.000.000,00	Bidang KBK3												
									2. Membuat SPK untuk keamanan dan pramusaji serta SK PPK														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	TR I			TR II			TR III			TR IV		
		TR I	TR II	TR III	TR IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							(Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)		3. Merekap jumlah pelayanan KB serta merekap kebutuhan balai penyuluhan KB setiap bulan														
									4. Membuat laporan kegiatan														
						Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Dokumen	1. Penyusunan Kerangka Acuan Kinerja tentang Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	160.000.000,00	Bidang Dalduk											
									2. Penyusunan Materi Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
									3. Pelaksanaan Kegiatan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
									4. Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
						Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	1. Penyusunan KAK kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	55.608.000,00	Bidang KBK3													
									2. Menyusun kebutuhan roll banner, poster, spanduk, baligho dan radio														
									3. Membuat design untuk roll banner, poster, spanduk dan baligho serta membuat daftar penerima dan mendistribusikan roll bannerr, poster, spanduk dan baligho														
									4. Membuat laporan kegiatan														
						Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	1. Penyusunan Kerangka Acuan Kinerja tentang Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	112.300.000,00	Bidang Dalduk													
									2. Penyusunan Materi Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
									3. Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
									4. Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
						Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan**	**63 orang**		**651.000.000,00**														
						Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1123 orang	1. Penyusunan KAK kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	651.000.000,00	Bidang KBK3													
									2. Membuat SK kader IMP														
									3. Merekap jumlah pelayanan KB per kecamatan														
									4. Membuat laporan kegiatan														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	TR I			TR II			TR III			TR IV		
		TR I	TR II	TR III	TR IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan**	**366 kali kegiatan**		**616.421.000,00**													
						Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	1. Penyusunan KAK kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	8.500.000,00	Bidang KBK3											
									2. Penyusunan rencana distribusi alokon														
									3. Distribusi alokon ke faskes dan PMB di Kabupaten Pangandaran														
									4. Membuat laporan pelaksanaan distribusi alokon														
						Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1831 Orang	1. Penyusunan KAK kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	586.771.000,00	Bidang KBK3												
									2. Membuat perjanjian kerjasama dengan PKM dan PMB serta membuat SPK operator mobil unit pelayanan KB														
									3. Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
									4. Membuat laporan kegiatan														
						Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	1. Penyusunan KAK kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.150.000,00	Bidang KBK3												
									2. Koordinasi pelayanan KB dengan faskes dan PMB														
									3. Pembinaan Pelayanan KB dengan faskes dan PMB														
									4. Membuat laporan kegiatan														
						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Jumlah kampung KB yang mendapat pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB**	**31 kampung kb**		**224.000.000,00**													
						Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	31 Kampung	1. Penyusunan KAK kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	224.000.000	Bidang KBK3												
									2. Melaksanakan Pertemuan kelompok kegiatan di kampung KB														
									3. Melaksanakan Pertemuan kelompok kerja di kampung KB														
									4. Membuat laporan kegiatan														
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**1. Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera**	**78,02%**		**2.382.889.000,00**													
							2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan	**75%**		**-**													
						Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**1. Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina**	**2 Kelompok**		**211.689.000,00**													
							2. Jumlah pembinaan tentang stunting yang dilaksanakan	**12 Kali Kegiatan**		**-**													
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan	2 Laporan	1. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	52.889.000													
									2. Pemilihan Duta GenRe tingkat Kabupaten														
									3. Mengikuti Workshop tingkat Provinsi														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	TR I			TR II			TR III			TR IV		
		TR I	TR II	TR III	TR IV							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Keluarga)		4. Menyusun Laporan Kegiatan														
						Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan	1. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	28.800.000,00													
									2. Pelaksanaan Sosialisasi PPKS														
									3. Konseling PPKS														
									4. Menyusun Laporan Kegiatan														
						Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	30 Unit	1. Penyusunan KAK kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000,00													
									2. Pengajuan Pengadaan Sarana (BKB KIT Stunting)														
									3. Distribusi Pengadaan Sarana (BKB KIT Stunting)														
									4. Menyusun Laporan Kegiatan														
						Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**5 Kelompok**		**2.171.200.000,00**													
						Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	**4 Organisasi**	1. Penyusunan KAK	13.000.000,00													
									2. Koordinasi lintas sektor terkait advokasi program KKBPK														
									3. Pelaksanaan Kegiatan														
									4. Penyusunan Laporan														
						Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil	**Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)**	**Laporan**	1. Penyusunan KAK	981.000.000,00													
									2. Pembinaan TPK (Tim Pendamping Keluarga)														
									3. Pelaksanana Kegiatan														
									4. Laporan Kegiatan														
						Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran	**Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu Hamil Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan**	**Laporan**	1. Penyusunan KAK	1.177.200.000,00													
									2. Pembinaan TPK (Tim Pendamping Keluarga)														
									3. Pelaksanana Kegiatan														
									4. Laporan Kegiatan														
JUMLAH										**8.622.710.259,00**													

BAB III
PENUTUP

Rencana Aksi atas Kinerja ini dimaksudkan sebagai upaya perwujudan sebuah Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih berkualitas, berorientasi hasil, tepat sasaran akuntabel, efektif dan efisien. Dalam rangka mendorong penyempurnaan dan perbaikan Capaian Kinerja di lingkungan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Pangandaran.

Hal tersebut sangat penting guna memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan Pencapaian Kinerja segenap jajaran Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang lebih Akuntabel serta Efektif dan Efisien. Tentunya agar harapan tersebut dapat terwujud sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka diperlukan Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran aparatur Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Pangandaran.

Parigi, 06 Januari 2025
Kepala Dinas
Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Pangandaran

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DKBP3A

H. DANI HAMDANI, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650417 199003 1 013